

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Australia merupakan salah satu negara yang secara sistematis mengembangkan strategi diplomasi publiknya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hubungan Australia–Indonesia menjadi contoh menarik dari upaya membangun kepercayaan melalui komunikasi lintas budaya. Menurut Melissen, tantangan terbesar dalam hubungan Australia–Indonesia bukan hanya terletak pada kepentingan politik atau ekonomi, tetapi pada persepsi publik yang dapat berubah (Melissen & Sohn, 2021).

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Lowy Institute pada tahun 2021 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia berada pada angka 55%. Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 20 poin dari tahun 2011. Bahkan dijelaskan pula bahwa sepertiga warga Indonesia (34%) melihat Australia sebagai ancaman bagi Indonesia (Bland, Laksmana, & Kassam, 2021). Australia dan Indonesia telah mengalami banyak masalah hubungan selama bertahun-tahun, sebagai contoh dari larangan ekspor ternak hidup Australia, penerapan hukuman mati di Indonesia, pengungkapan penyadapan telepon, dan perbedaan pendapat tentang penyelundupan manusia. Dan masing-masing masalah ini tidak hanya merusak hubungan diplomatik pada saat itu tetapi juga berdampak jangka panjang dalam meruntuhkan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, diplomasi publik menjadi sarana krusial bagi Australia untuk membangun kembali citra positifnya di mata masyarakat Indonesia.

Sadar akan pentingnya hal tersebut, melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan berbagai Konsulat Jenderal di kota-kota besar Indonesia, Australia mengembangkan berbagai program diplomasi publik yang berorientasi budaya. Salah satu inisiatif yang paling konsisten dan menonjol adalah Festival Sinema Australia–Indonesia (FSAI), yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016. FSAI merupakan program tahunan yang menampilkan film-film Australia dan Indonesia di berbagai kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan kota lainnya. Selain penayangan film terkenal dari Australia dan Indonesia, FSAI juga menyelenggarakan *masterclass* film yang diikuti oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar, komunitas film, dan lainnya (Hikmah, 2024).

Kegiatan seperti FSAI juga berperan dalam memperkuat hubungan *people-to-people* yakni suatu dimensi penting dalam diplomasi publik yang menekankan hubungan antar-individu dan komunitas, bukan semata hubungan antarnegara. Strategi ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia yang menempatkan diplomasi budaya sebagai bagian integral dari *Australia's Foreign Policy White Paper* (2017), yang menegaskan pentingnya peran budaya dan pendidikan dalam membangun kepercayaan strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Namun, meskipun FSAI telah berlangsung lebih dari sembilan tahun dan mendapatkan perhatian luas di media serta masyarakat, kajian akademik terhadap festival ini masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai diplomasi publik Australia di Indonesia umumnya berfokus pada program pendidikan seperti *Australia Awards Scholarship* atau program bantuan luar negeri

(*foreign aid*) (Abimbola, et al., 2016). Sementara itu, kajian mengenai diplomasi budaya melalui film cenderung didominasi oleh konteks hegemoni budaya Amerika Serikat (*Hollywood Diplomacy*) atau pengaruh Korea Selatan melalui *Hallyu Wave*. Artinya, terdapat kekosongan riset yang signifikan terkait pemanfaatan film sebagai instrumen diplomasi publik Australia di Indonesia.

Penelitian mengenai diplomasi publik menunjukkan bahwa budaya populer memiliki peran penting sebagai instrumen *soft power* dalam hubungan internasional. Film sering digunakan untuk menyampaikan nilai, identitas, dan citra negara kepada audiens asing. Sejumlah studi menegaskan bahwa medium ini mampu membangun ketertarikan dan pemahaman lintas budaya. Namun, pendekatan dan fokus analisis dalam penelitian-penelitian tersebut masih beragam. Perbedaan ini terlihat dari aktor, instrumen, dan konteks kebijakan yang dikaji.

Emimah (2022) secara khusus meneliti Festival Sinema Australia-Indonesia (FSAI) sebagai instrumen diplomasi publik Australia pada periode 2016-2022. Penelitian ini menggunakan konsep *soft power* Joseph Nye dan kerangka diplomasi publik Mark Leonard serta Nicholas J. Cull. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FSAI efektif dalam membangun persepsi positif publik Indonesia terhadap Australia. Film diposisikan sebagai medium strategis untuk menampilkan identitas budaya dan nilai sosial Australia. Fokus utama penelitian ini adalah pembentukan citra dan penguatan jejaring kreatif (Emimah, 2022).

Berbeda dengan itu, Tamara (2017) membahas film sebagai sarana diplomasi publik Indonesia dalam konteks festival film internasional. Penelitian ini menyoroti partisipasi sineas Indonesia di Berlinale sebagai upaya membangun citra

nasional (Tamara, 2017). Christina (2018) juga menempatkan Indonesia sebagai aktor diplomasi budaya melalui film dan festival film di Australia. Kedua penelitian tersebut menekankan peran multi-aktor dalam diplomasi publik. Dengan demikian, orientasi kebijakannya berbeda dari penelitian yang menempatkan Australia sebagai subjek utama (Christina, 2018).

Fiorentina (2021) menganalisis diplomasi publik Australia terhadap Indonesia melalui *The New Colombo Plan*. Penelitian ini berfokus pada pendidikan internasional dan mobilitas pelajar sebagai instrumen *soft power*. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pertukaran pendidikan efektif dalam membangun hubungan *people-to-people*. Namun, penelitian ini tidak membahas budaya populer atau film sebagai medium diplomasi. Instrumen yang dianalisis berbeda dengan FSAI (Fiorentina, 2021).

Suryanto dan Amri (2018) memberikan landasan konseptual mengenai film sebagai aset diplomasi budaya. Artikel ini menekankan peran film sebagai alat non-koersif dalam membangun citra bangsa. Film dipandang mampu menciptakan dialog lintas budaya dan memperkuat karakter nasional. Namun, kajian ini bersifat normatif dan konseptual. Analisis terhadap praktik diplomasi budaya dalam konteks bilateral belum menjadi fokus utama (Suryanto & Amri, 2018).

Tulisan-tulisan terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai diplomasi publik dan diplomasi budaya melalui film telah berkembang dengan cukup luas. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis Festival Sinema Australia–Indonesia (FSAI) sebagai strategi diplomasi publik Australia yang dirancang dan dijalankan secara terencana. Penelitian sebelumnya umumnya

menempatkan FSAI sebagai contoh program budaya, bukan sebagai objek analisis strategis. Selain itu, aspek perencanaan pesan dan tujuan komunikasi jarang dibahas secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang masih terbuka.

Lebih lanjut, belum terdapat kajian yang secara sistematis membahas siapa target audiens strategis FSAI dan bagaimana interaksi sosial-budaya dalam festival tersebut diharapkan membentuk persepsi masyarakat Indonesia terhadap Australia. Dimensi komunikasi strategis dalam FSAI, seperti pemilihan tema film dan bentuk kolaborasi dengan aktor lokal, juga belum banyak dianalisis. Padahal, aspek-aspek tersebut penting untuk memahami efektivitas diplomasi publik berbasis budaya. Oleh karena itu, FSAI perlu dikaji tidak hanya sebagai kegiatan budaya, tetapi sebagai instrumen diplomasi publik yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memeriksa Festival Sinema Australia–Indonesia (FSAI) pada periode 2021–2024 di mana periode tersebut juga melihat faktor pandemi dan pasca pandemi sebagai studi kasus diplomasi publik Australia di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada cara komunikasi strategis yang dijalankan melalui festival ini. Analisis mencakup perancangan pesan, pemilihan tema film, kolaborasi dengan sineas Indonesia, serta bentuk partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menempatkan FSAI dalam konteks strategis hubungan bilateral dan praktik *soft power* Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama yakni Bagaimana Pemerintah Australia melaksanakan diplomasi publiknya ke Indonesia melalui FSAI di tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memenuhi persyaratan Pendidikan Sarjana Strata (S1) dalam Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis FSAI dalam mendukung agenda diplomasi publik Australia di Indonesia dengan mengidentifikasi strategi program FSAI dalam menysasar masyarakat di Indonesia pada periode 2021 hingga 2024. Penelitian ini dilakukan guna kepentingan akademis dalam rangka melengkapi *research gap* dalam penelitian sebelumnya terkait hubungan antara prinsip diplomasi publik dalam upaya meningkatkan citra Australia di Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Diplomasi Publik

Dalam perkembangan kajian diplomasi publik, pendekatan yang lebih relasional dikemukakan oleh Andreas Pacher (2018) melalui konsep *three-level heuristic device*. Pendekatan ini menekankan bahwa diplomasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga dengan hubungan sosial antara aktor diplomatik dan publik yang menjadi sasaran. Publik dipahami sebagai

individu atau kelompok yang memiliki posisi strategis tertentu dalam struktur sosial dan politik. Dengan demikian, diplomasi publik dipandang sebagai proses interaksi yang bersifat dua arah (Pacher, 2018).

Pacher memandang diplomasi publik sebagai praktik representasi sosial antara aktor diplomatik (baik negara maupun non-negara) dengan pihak lain yang disebut sebagai *the Other*. Dalam interaksi ini, kedua pihak tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga menegosiasikan makna, identitas, dan citra. Hubungan tersebut bersifat dinamis karena melibatkan berbagai lapisan publik dengan kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Oleh karena itu, diplomasi publik perlu memahami karakteristik audiens secara lebih spesifik.

Untuk menjelaskan variasi hubungan tersebut, Pacher memperkenalkan dua dimensi analisis utama. Pertama, *strategic importance*, yaitu tingkat kepentingan suatu publik terhadap tujuan kebijakan luar negeri negara. Kedua, *power position*, yaitu kapasitas individu atau kelompok dalam memengaruhi proses dan hasil diplomasi. Kedua dimensi ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap siapa audiens strategis diplomasi publik dan bagaimana perannya dalam membentuk persepsi. Kerangka ini relevan untuk menganalisis praktik diplomasi publik berbasis budaya, termasuk festival film sebagai ruang interaksi sosial.

Berdasarkan kombinasi dua dimensi tersebut, Pacher mengklasifikasikan enam kategori *strategic publics*. Pertama, *traditional diplomatic partners* merujuk pada pejabat tinggi atau aktor negara yang memiliki kekuasaan dari entitas strategis, seperti pemerintah, kementerian luar negeri, atau institusi resmi lainnya yang berperan langsung dalam pengambilan kebijakan. Kedua, *imminent strategic*

publics adalah individu berpengaruh dari negara mitra penting, seperti pelaku industri, akademisi, maupun jurnalis utama yang memiliki kapasitas untuk membentuk opini publik maupun arah kerja sama bilateral.

Ketiga, *protocollary strategic publics* mencakup individu berpengaruh yang tidak terikat secara politik, misalnya selebritas atau tokoh publik, yang dapat membantu memperluas jangkauan pesan diplomasi melalui popularitas mereka. Keempat, *salient strategic publics* merupakan kelompok non-elite dari negara penting, seperti pelajar, komunitas budaya, atau organisasi masyarakat sipil, yang memiliki peran dalam membangun pemahaman dan hubungan jangka panjang antar masyarakat.

Kelima, *remote strategic publics* merujuk pada masyarakat dari negara atau kelompok yang dinilai kurang strategis dalam kepentingan langsung suatu negara, namun tetap menjadi bagian dari lanskap komunikasi global. Terakhir, *global mass publics* adalah audiens global secara luas yang menerima pesan diplomasi melalui berbagai saluran media, baik tradisional maupun digital, sehingga membentuk persepsi internasional terhadap suatu negara.

Model ini menunjukkan bahwa diplomasi publik bersifat *multilevel* dan multidimensional. Ia tidak hanya melibatkan satu jenis audiens, melainkan berbagai lapisan publik yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Menurut Pacher (2019), diplomasi publik harus dilihat sebagai ekosistem interaksi antara negara dan masyarakat asing melalui tiga lapisan:

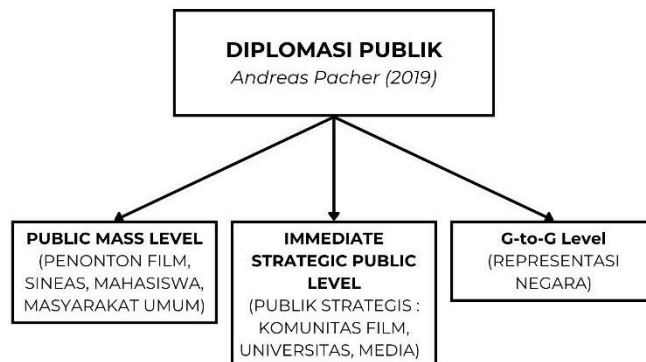
Tabel 1. 1 Indikator Operasional Tiga Level Diplomasi Publik menurut Andreas Pacher (2018)

Level	Lapisan	Indikator Operasional	Contoh
<i>Government-to-Government (G-to-G Level)</i>	Hubungan antar Aktor Negara secara Formal	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor merupakan perwakilan resmi negara • Interaksi bersifat institusional dan formal • Beroperasi dalam kerangka diplomasi tradisional • Fokus pada representasi dan legitimasi politik • Menjadi referensi simbolik bagi praktik diplomasi publik 	Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menganugerahkan <i>Grand Order of Mugunghwa</i> (Penghargaan tertinggi di Korea Selatan) kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014
<i>Immediate Strategic Public Level</i>	Publik tertentu yang memiliki relevansi strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Audiens dipilih secara spesifik • Berdasarkan kepentingan strategis dan/atau posisi kekuasaan • Interaksi bersifat dua arah (dialogis) • Terjadi negosiasi makna, identitas, dan citra 	Para peserta asal Perancis yang menerima hibah dari <i>International Visitor Leadership Program (IVLP)</i> Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1985 berasal dari kalangan pegawai negeri,

		<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan bersifat relasional dan berkelanjutan 	<p>akademisi, bisnis dan keuangan, politik, serikat dagang, dan jurnalisme Perancis.</p>
<i>Mass Public Level</i>	Publik Luas yang bersifat Kolektif dan Anonim	<ul style="list-style-type: none"> • Audiens tidak tersegmentasi secara strategis • Interaksi bersifat satu arah (<i>signaling</i>) • Komunikasi dimediasi oleh media dan simbol budaya • Tujuan utama membentuk persepsi dan citra umum • Tidak terjadi negosiasi makna secara langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Proklamasi doktrin geopolitik baru oleh Presiden AS mengirimkan sinyal yang secara sengaja menjangkau publik massa global (<i>global mass publics</i>) melalui saluran-saluran termediasi. • Unggahan di Twitter oleh seorang diplomat publik yang berpengaruh dengan sentralitas jaringan yang tinggi juga dapat dengan cepat menyebar luas hingga ke publik massa global.

Sumber: Diadaptasi dari Pacher (2018)

1.5 Sintesis Pemikiran



Gambar 1. 1 Bagan Sintesis Pemikiran

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Bagan Sintesis Pemikiran di atas menunjukkan bahwa diplomasi publik dapat dipahami melalui tiga level audiens. Ketiga level tersebut menggambarkan cara negara menjangkau publik asing. Setiap level memiliki sasaran dan fungsi yang berbeda. Diplomasi publik tidak hanya menasar masyarakat luas. Praktik ini juga melibatkan aktor strategis dan aktor negara.

Level pertama adalah *Government-to-Government (G-to-G) Level*. Level ini mencakup interaksi formal antar-pemerintah. Diplomasi publik tetap bekerja ketika interaksi tersebut berdampak pada citra negara. Bentuknya antara lain kerja sama kebijakan dan koordinasi institusional. Meskipun bersifat formal, level ini membawa pesan simbolik bagi publik luar negeri.

Level kedua adalah *Immediate Strategic Public Level*. Level ini menasar kelompok publik yang memiliki pengaruh strategis. Kelompok tersebut meliputi akademisi, jurnalis, pemimpin opini, dan diaspora. Interaksi pada level ini bersifat terarah dan relasional. Tujuannya adalah membangun kepercayaan dan hubungan jangka menengah.

Level ketiga adalah *Public Mass Level*. Level ini menargetkan khalayak luas. Diplomasi publik dilakukan melalui media dan pesan umum. Interaksi bersifat tidak langsung dan satu arah. Fokusnya adalah membentuk opini publik secara luas dan berkelanjutan.

1.6 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa Festival Sinema Australia–Indonesia (FSAI) periode 2021–2024 merupakan strategi diplomasi publik Australia. Pada level *Government-to-Government (G-to-G)*, FSAI menjadi sarana komunikasi simbolik antarnegara. Peran ini terlihat dari keterlibatan Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Pesan resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Australia berfungsi membangun citra nasional Australia.

Pada level *Immediate Strategic Public*, FSAI menasar kelompok publik yang bersifat strategis. Kelompok ini meliputi pembuat film, akademisi, dan pelaku industri kreatif. Pihak Universitas seperti Universitas Airlangga, Universitas Kristen Petra pun dilibatkan dalam penyelenggaraan *master class* film ini. Australia menjalankan strategi ini melalui *master class* dan kegiatan kolaboratif. Interaksi tersebut bertujuan membangun relasi dan kepercayaan jangka menengah.

Pada level *Mass Public*, FSAI menargetkan masyarakat Indonesia secara luas. Strategi ini dijalankan melalui penayangan film Australia dan film karya alumni pendidikan Australia. Film digunakan sebagai medium komunikasi budaya yang mudah diakses. Melalui narasi film, Australia menyampaikan nilai dan identitas nasionalnya.

Dengan demikian, FSAI tidak sekadar kegiatan budaya. Festival ini berfungsi sebagai instrumen diplomasi publik yang berlapis. Praktiknya melibatkan aktor negara dan non-negara. FbSAI juga menunjukkan bagaimana *soft power* dijalankan melalui media budaya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek atau konteks yang diteliti. Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, serta berusaha memahami makna di balik fenomena tersebut (Moleong, 2010). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran terhadap praktik diplomasi publik Australia melalui Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI), yang dianalisis menggunakan tiga level analisis Diplomasi Publik oleh Andreas Pacher. Fokus pada konteks sosial dan simbolik menjadikan pendekatan kualitatif paling tepat untuk menggali pesan, strategi, dan dinamika komunikasi budaya yang berlangsung melalui medium film.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) selama kurun waktu 2021 hingga 2024. Pemilihan rentang waktu empat tahun (2021–2024) didasarkan pada pertimbangan dinamika penyelenggaraan FSAI yang mengalami perubahan signifikan akibat pandemi COVID-19. Pada awal masa pandemi, festival dilaksanakan secara daring atau

hybrid, sementara pada tahun-tahun berikutnya, termasuk 2024, penyelenggaraan kembali dilakukan secara luring di sepuluh kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Mataram, Makassar, Manado, dan Padang. Dengan jangkauan waktu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menangkap konsistensi dan transformasi strategi diplomasi publik Australia, baik dalam situasi krisis maupun dalam fase pemulihan dan adaptasi. Secara substantif, fokus penelitian ini meliputi tiga aspek utama, yakni strategi diplomasi publik Australia di Indonesia melalui FSAI, Representasi citra dan nilai-nilai Australia dalam film yang diputar, Respons serta keterlibatan publik Indonesia.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yakni pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak Konsulat Jenderal Australia di Surabaya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif diplomatik dan tujuan strategis dari penyelenggaraan FSAI di wilayah kerja Konsulat. Bentuk wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai arah pembicaraan tanpa kehilangan fokus pada topik utama. Data primer juga didapat melalui Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia untuk memberikan perspektif diplomatik dari Australia.

Data juga dapat meliputi observasi non-partisipatif terhadap materi publik seperti sambutan resmi dan siaran pers yang diunggah oleh pihak Kedutaan maupun Konsulat. Data sekunder didapatkan oleh peneliti dengan studi pustaka melalui sumber daring dan pustaka seperti situs resmi Kedutaan Besar dan Konsulat

Jenderal Australia, portal berita (The Jakarta Post, IDN Times, Liputan 6), jurnal ilmiah terkait diplomasi publik dan soft power, laporan kebijakan seperti *Australia's Foreign White Paper 2017*, dan dokumentasi FSAI 2016-2024 termasuk poster, film, dan liputan media sosial resmi melalui media sosial resmi milik Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Australia di Indonesia.

Tabel 1. 2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data	Sumber data
Transkrip Wawancara	Wawancara Konsulat Jenderal Australia di Surabaya
Siaran Media	Laman Resmi Kedutaan Besar Australia di Indonesia
Country Brief	Laman Resmi <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i> (DFAT) Australia Government
Foreign Policy White Paper	Laman Resmi <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i> (DFAT) Australia Government
Artikel Berita	Laman web Portal Berita The Jakarta Post, Beritajatim, Liputan6, Kompas,
Postingan Instagram	Akun Instagram resmi Kedutaan Besar Australia di Indonesia

Catatan: Dituliskan oleh penulis berdasarkan penemuan data awal yang ada

1.7.4 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), yaitu metode untuk menafsirkan isi teks atau dokumen dengan cara mengidentifikasi tema, pola, dan makna tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi adalah teknik riset untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data berdasarkan konteksnya, khususnya dalam komunikasi simbolik dan media. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengeksplorasi makna yang

tersembunyi di balik teks, simbol, atau narasi dalam dokumen, baik berupa transkrip, laporan, artikel berita, maupun publikasi resmi (Krippendorff, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan hasil wawancara terkait pelaksanaan Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) di Surabaya pada periode 2021–2024. Tiga level analisis yang dikemukakan oleh Andreas Pacher yakni *Mass Public level*, *Immediate Strategic Public level*, dan *G-to-G level* digunakan sebagai kategori analisis (*coding framework*) untuk mengklasifikasikan data yang ditemukan. Setiap level menjadi alat untuk menilai strategi komunikasi dan diplomasi yang dilakukan oleh Australia melalui kegiatan FSAI. Proses analisis dilakukan secara interpretatif, berfokus pada isi, konteks, dan struktur narasi dalam dokumen dan hasil wawancara yang dikaji.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam empat bab utama yang disusun secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran serta argumentasi yang dikembangkan. Setiap bab memiliki fungsi dan muatan materi yang saling berkaitan dan mendukung tujuan penelitian secara keseluruhan.

BAB I, memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat teoretis dan empiris dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, disampaikan pula kerangka pemikiran yang menjelaskan teori yang digunakan. Bagian akhir bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai penuntun struktur skripsi.

BAB II, Menganalisis pelaksanaan FSAI oleh Australia di Indonesia dengan implementasi dari level analisis diplomasi publik oleh Andreas Pacher pada level *Government-to-Government*.

BAB III, berisi terkait implementasi 2 level analisis diplomasi publik oleh Andreas Pacher, yakni *Immediate Strategic Public Level* dan *Mass Public Level*. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana strategi Australia lewat FSAI untuk membangun dampak bagi citra Australia di publik Indonesia.

BAB IV, memuat paparan penutup dan saran terkait dengan kemungkinan perkembangan penelitian selanjutnya yang membahas topik ini.